

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

1. Kebijakan pengendalian vektor di pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan barang sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam *International Health Regulations* (IHR) 2005 bagian 4 pada pasal 19 belum terlaksana dengan baik.
2. Sumber daya manusia sudah memenuhi syarat karena otoritas pelabuhan sudah bekerja sama dengan pihak yang bergerak di bidang pengendalian vektor tapi jumlah sumber daya manusia yang menangani pengendalian vektor masih sangat kurang melihat terdapat 7 tempat yang menjadi tanggungjawab pihak KKP kelas III Gorontalo
3. Teknik operasional KKP sudah sesuai aturan yang berlaku di Dirjen PP&PL, tapi untuk pelaksanaannya di lapangan masih belum berjalan dengan semestinya. KKP masih terkendala dengan jumlah SDM dan juga anggaran yang ada.

## **5.2 Saran**

1. Otoritas pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan barang harus memiliki penanggungjawab pengendalian vektor pada masing – masing otoritas agar tidak bergantung di KKP.
2. KKP seharusnya memiliki tanggungjawab penuh dalam hal pelaksanaan pengendalian vektor dan bukan hanya pengawasan saja.
3. Penambahan SDM di kantor kesehatan pelabuhan sangat diperlukan melihat banyaknya wilayah kerja dari KKP.

## DAFTAR PUSTAKA

- Boekoesoe, Lintje. 2015. *Ancaman Demam Berdarah Dengue*. Penerbit Samudra Himalaya. Gorontalo.
- Direktorat Jenderal PP&PL Departemen Kesehatan RI. (2009). *Standar Operasional Prosedur Nasional Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan di Pintu Masuk Negara*. Jakarta.
- Direktorat PPM & PL Departemen Kesehatan RI. (2001). *Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Lingkungan dalam Pengendalian Vektor*. Jakarta.
- Direktorat PPM&PL Departemen Kesehatan RI. (2003). *Pedoman Pengendalian vektor di Angkutan Umum*. Jakarta.
- Budiarty, Indah. 2012. *Gambaran Manajemen Pengendalian Vektor Di Bandara Soekarno-Hatta*. Skripsi. Universitas Indonesia.
- Hasim, Abbas. 2015. *Manajemen Pelabuhan*. Kompas Gramedia. Jakarta.
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Gorontalo. 2016. *Laporan Tahunan 2016*. Gorontalo
- Keputusan Dirjen PP&PL Nomor HK.03.05/D/I.4/2659/2007 Tentang Petunjuk Teknis Disinseksi Kapal Laut dan Pesawat Udara.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 356 /MENKES/PER/IV/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.
- Keputusan Menteri Perhubungan Negara No. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1350 /MENKES/PER/IV/2001 tentang Pengelolaan Pestisida.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 431 /MENKES/PER/IX/2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan.
- Keputusan Dirjen PPM&PL Nomor 138-I/PD.03.04.EI Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Hapus Tikus di Kapal Dalam Rangka Penerbitan Surat Keterangan Hapus Tikus (*Deratting Certificate*).
- Keputusan Dirjen PP&PL Nomor 716-1/P.D.03.04.EI Tahun 1990 tentang Bahan Kimia (Fumigan) yang Digunakan Dalam Rangka Penerbitan Surat Keterangan Hapus Tikus Bagi Kapal.

- Kusnoputranto, Haryoto & Santi, Dewi . (2004). *Kesehatan Lingkungan*. FKM UI. Depok.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2012). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Profil PT Pelabuhan Indonesia IV (PELINDO IV) Cabang Gorontalo. 2017. Gorontalo
- Profil UPT. Kantor Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo. 2017. Gorontalo.
- Simanjuntak, Payaman J. (2006). *Tikus Dan Pinjal*. FKMUI. Jakarta.
- Soeharsono, Nugroho Susetya. (1994). *Serangga Di Sekitar Kita*. Kanisius. Yogyakarta.
- Soejoedi, Agus. (2005). *Pengawasan Serangga Vektor di Bandara Soekarno-Hatta*. Jakarta.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sub.Dit Kesehatan Pelabuhan dan Daerah Perbatasan. (2002). *Pedoman Pengamatan dan Pemberantasan Nyamuk Aedes Aegypti dan Anopheles di Lingkungan Pelabuhan Laut dan Bandara*, Dit.Jen PPM dan PL, Depkes RI. Jakarta.
- WHO. (2007) . *International Health Rugulations (2005)*. Genewa.